ABSTRAK

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH HUMAS PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)

(Studi Deskriptif Tentang Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Oleh Humas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Dalam Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance)

Oleh :
Nooryla Rizkiya Vriadika
NIM. 41814052

Skripsi ini dibawah bimbingan :
Olih Solihin, S.Sos., M.I.Kom

The aim of this research is to investigate the implementation of public information disclosure by PT. Kereta Api Indonesia's (Persero) Division of Public Relations in regards to the implementation of Good corporategovernance principal which is viewed based on the spread and control of the information.

The research method used is descriptive-qualitative. The informants were chosen with snowball-sampling with two key informants and three supporting informants. The data were gathered through non-participatory observation, in depth interview, documentation and library study. The data were gathered, reduced, served, and concluded.

The result of the research shows that PT. Kereta Api Indonesia's (Persero) Division of Public Relations is rightful of spreading public information because the PPID is in possession of the Public Information Care manager. The information published is transparent and accountable which includes routine, compulsory, and necessary information using social media, website, and printed media as the mean of information spreading. The PPID controls the information published and is responsible for it. Some information such as the company's secret are classified. Demanding for information has to undergo the procedure regulated by PT. KAI.

This research concludes that the implementation of information disclosure by PT. Kereta Api Indonesia's division of public relations has realized the good corporategovernance which includes being transparent, accountable, fair, independent and responsible.

This research suggests that the PT. Kereta Api Indonesia's division of public relations to maintain the public information service as the realisation the good corporategovernance.

Keywords: Public Relations, Public Information Disclosure, PT. Kereta Api Indonesia, Good Corporate Governance

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Saat ini keterbukaan informasi publik sedang marak dilakukan di negara Indonesia, keterbukaan informasi publik merupakan suatu ciri negara yang demokratis karena informasi publik mendorong masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan yang baik. Dalam pelaksanaannya keterbukaan informasi publik di dasari oleh undang-undang no 14 tahun 2008 yaitu mengenai keterbukaan informasi publik.

PT. Kereta Api Indonesia melakukan penerapan keterbukaan informasi publik pada tahun 2010 setelah dua tahun keluarnya undang-undang no. 14 tahun 2008 mereka lalu membuat SK direksi mengenai penerapan keterbukaan informasi publik. PT. Kereta Api Indonesia sebagai badan publik yang dituntut untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik menunjuk divisi humas bagian *public information care* sebagai PPID. PPID yaitu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dipegang oleh manager *public information care*.

Dalam penerapan keterbukaan informasi publik di PT. Kereta Api Indonesia dinilai belum efektif dalam menerapkannya karena kurangnya sosialisasi-sosialisasi baik kepada masyarakat dan juga publik internal perusahaan yaitu karyawan-karyawan di PT. Kereta Api Indonesia. Humas PT. Kereta Api Indonesia pada tahun 2016 mulai gencar mensosialisasikan mengenai penerapan keterbukaan informasi publik yang sedang mereka lakukan dengan cara membuat brosur da juga website pada tahun 2016.

Menurut asisten manager public information care informasi yang disediakan di website PT. Kereta Api Indonesia meliputi tiga yaitu informasi serta merta, informasi berkala, dan informasi wajib ada. Penerapan keterbukaan informasi publik salah satunya sebagai partisipasi pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan juga

kesetaraan. Dimana prinsip-prinsip tersebut merupakan tolak ukur sebuah perusaah untuk menjadi tata kelola perusahaan yang baik.

Di Indonesia seluruh perusahaan baik pemerintah maupun non pemerintahan wajib melakukan penerapa keterbukaan informasi publik, yang setiap tahunnya itu akan dipantau oleh komisi informasi pusat yang berada di Jakarta. Komisi informasi pusat itu mengadakan monitoring dan juga evaluasi mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang perusahaan-perusahaan lakukan di seluruh Indonesia. Perusahaan dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam memberikan informasi kepada publik atau masyarakat umum.

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan oleh peneliti diatas peneliti tertarik untuk meneliti "Bagaimana Implementasi keterbukaan informasi publik oleh Humas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* ?"

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah Makro

Rumusan masalah makro dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Implementasi keterbukaan informasi publik oleh Humas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* ?"

Rumusan Masalah Mikro

Rumusan masalah mikro dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana penyebarluasan informasi kepada publik yang dilakukan oleh Humas PT. Kereta Api Indonesia dalam pelaksanaan prinsip *Good corporate governance* ?
2. Bagaimana pengendalian informasi kepada publik yang dilakukan oleh Humas PT. Kereta Api Indonesia dalam pelaksanaan prinsip *Good corporate governance* ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai Implementasi Keterbukaan informasi publik oleh Humas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan prinsip *Good corporate governance.*

Tujuan Penelitian

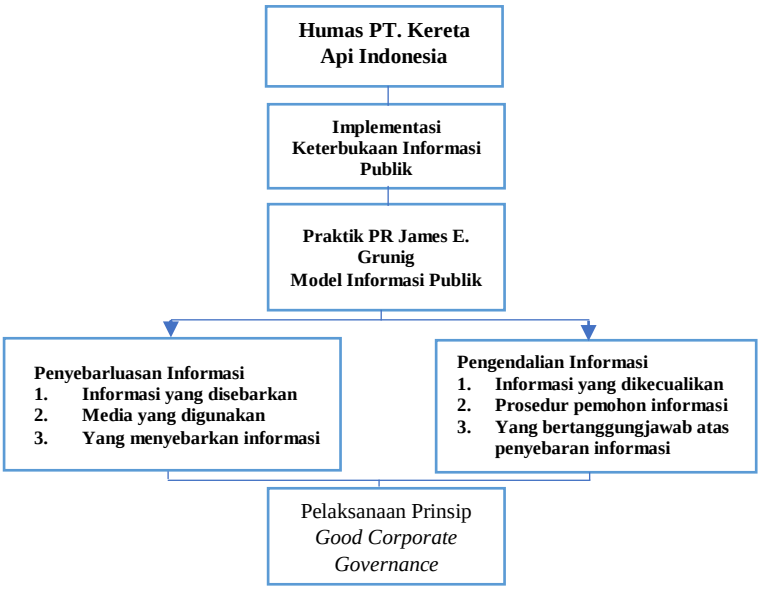
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penyebarluasan informasi kepada publik yang dilakukan oleh Humas PT. Kereta Api Indonesia dalam pelaksanaan prinsip *Good corporate governance*.
2. Untuk mengetahui pengendalian informasi kepada publik yang dilakukan oleh Humas PT. Kereta Api Indonesia dalam pelaksanaan prinsip *Good corporate governance.*

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang telah peneliti buat, terdapat alur yang saling berhubungan dengan dimulai dari Humas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) melalui Implementasi keterbukaan informasi publik yang di dalamnya terdapat penyebaran informasi dan pengendalian informasi yang menjadi sub fokus penelitian di dalam penelitian ini, hingga berujung pada tujuan yaitu ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan prinsip *Good corporate governance* yang nantinya akan berdampak pada peningkatan tata kelola perusahaan yang baik bagi PT. Kereta Api Indonesia.



Sumber : Peneliti 2018

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi deskriptif sebagai desain penelitiannya.

Informan Penelitian

informan merupakan orang-orang yang dapat memberikan keterangan atau penjelsan seputar penelitian yang akan peneliti lakukan. Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*.

Data Informan Kunci

No	Nama	Jabatan	Usia
1	R. Teja Wulan	Asisten Manajer *Public Information Care*	37 thn
2	Fahrur Reza	Staff *Public Information Care*	29 thn

Data Informan Pendukung

No	Nama	Jabatan	Usia
1	Dwi Ajeng Nurul	Mahasiswi Universitas Telkom	21 thn
2	Risa Anisa S	Mahasiswa UIN	22 thn
3	Wury Andhayani	Pegawai Perumnas	36 thn

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Kereta Api Indonesia Kantor Pusat Bandung, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Kota Bandung.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selam enam bulan terhitung mulai bulan Maret 2018 sampai Agustus 2018.

4. Hasil dan Pembahasan

1. Penyebarluasan Informasi

Humas PT. Kereta Api Indonesia dalam menyebarkan informasi ada informasi yang harus dimohon oleh pemohon informasi dan ada juga yang sudah disediakan oleh humas PT. Kereta Api Indonesia. Informasi yang disediakan oleh Humas PT. Kereta Api Indonesia itu sesuai dengan undang-undang yaitu Informasi berkala, Informasi serta merta dan Informasi wajib ada

Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik yang terdiri dari informasi berkala dan informasi serta merta badan publik wajib selalu mengumumkannya sesuai dengan keberadaan atau waktu keluarnya informasi, tanpa menunggu dimohon. Informasi yang disediakan oleh Humas PT. Kereta Api Indonesia dinilai sudah transparan sesuai dengan prinsip dari *Good corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik yaitu prinsip transparansi. Prinsip transparansi yang dimaksudkan yaitu keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan juga relevan mengenai PT. Kereta Api Indonesia. Kehadiran undang-undang KIP ini merupakan upaya mewujudkan perusahaan yang transparan, efektif dan efisien serta akuntabel dapat dipertanggungjawabkan termasuk untuk mengetahui alasan dibalik penyebaran informasi yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Media yang digunakan oleh humas PT. Kereta Api Indonesia yaitu media cetak seperti brosur mengenai keterbukaan informasi publik dan media online seperti website dan juga email. Media yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada publik yaitu website dimana website itu sebagai wadah untuk masyarakat mengetahui informasi apa saja yang disediakan oleh humas PT. Kereta Api Indonesia dan untuk yang memohon informasi kepada PT. Kereta Api dapat melalui website yang telah disediakan oleh humas PT. Kereta Api Indonesia. Jadi pemohon informasi atau masyarakat yang ingin mencari tau bahwa informasi mengenai perkeretaapian dapat mengunjungi website keterbukaan informasi publik yang sudah disediakan oleh humas PT. Kereta Api Indonesia. untuk melaksanakan keterbkaan informasi pblik di PT. Kereta Api Indonesia itu membutuhkan perangkat untuk mengelola semua informasi-informasi yang akan disebarkan kepada publik. PT. Kereta Api Indonesia sebagai badan publik menunjuk PPID "pejabat pengelola informasi dan dokumentasi" nya pada bagian *Public Information Care* yang berada di bawah VP *Public Rlations* PT. Kereta Api Indonesia.

2. Pengendalian Informasi

Pengendalian informasi ini dilakukan salah satunya yaitu untuk menjaga citra PT. Kereta Api Indonesia dan juga untuk mengelola informasi apa saja yang dapat diberikan dan disediakan oleh badan publik dan juga informasi yang dikecualikan tidak boleh disebarkan kepada badan publik.

Dalam mengendalikan informasi khususnya kepada masyarakat itu informasi hanya dikeluarkan dari satu pintu yaitu PPID, PPID yang menjabat di PT. Kereta Api Indonesia itu dipegang oleh manager Public Information Care jadi dengan adanya PPID dalam PT. Kereta Api Indonesia itu tidak sembarangan orang yang dapat menyebarkan informasi yang boleh dikeluarkan kepada masyarakat.

Dalam memohon informasi ke PT. Kereta Api Indonesia itu harus melalui prosedur-prosedur yang telah diberikan seperti pemohon mengajukan permintaan informasi kepada badan publik yaitu PT. Kereta Api Indonesia secara langsung, surat maupun email, lalu pemohon informasi menyebutkan nama, lalu jenis informasi yang akan diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan, PPID pada badan publik mencatat semua yang disebutkan pemohon, lalu pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran permintaan.Warga Negara Asing (WNA) jika memohon informasi publik kepada PT. Kereta Api Indonesia itu tidak akan diberikan oleh mereka karena sesuai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik di PT. Kereta Api Indonesia dalam penerapannya itu mengalami sedikit kendala seperti dalam meminta data ke unit lain itu ada beberapa unit memiliki proses yang cukup lama dalam memberikan data kepada PPID.

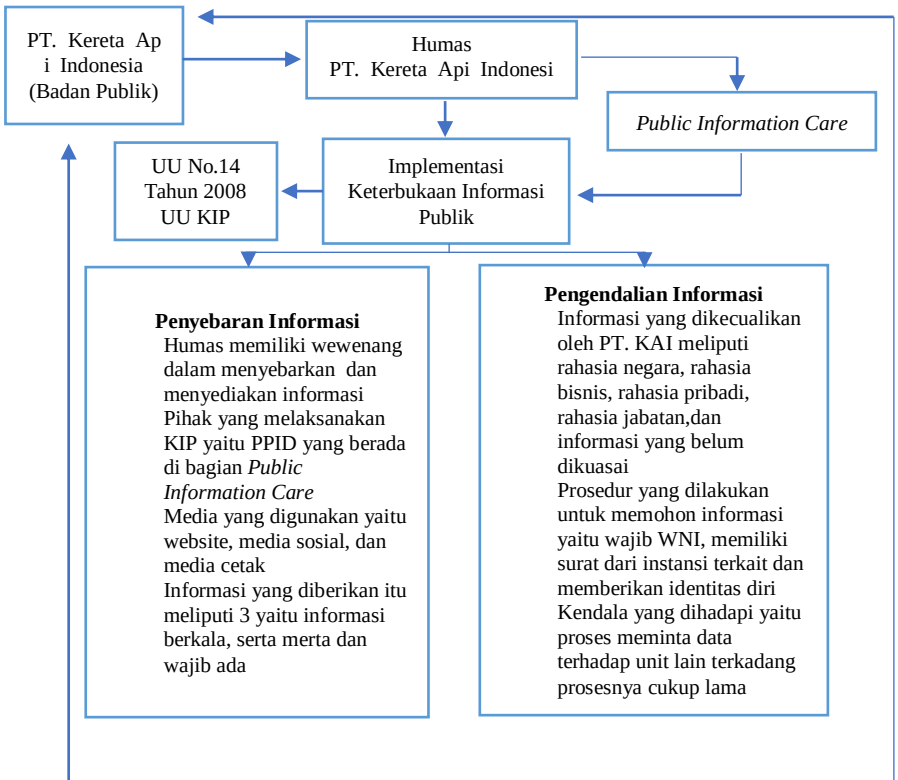
Dalam keterbukaan informasi yang dilakukan oleh humas PT. Kereta Api Indonesia bahwa pengendalian yang dilakukan meliputi pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilandasi oleh undang-undang, dimana yang bertanggungjawab atas informasi yang disebarkan kepada publik merupakan tanggungjawab PPID pertanggungjawaban yaitu merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat, serta dalam memutuskan untuk menyebarkan informasi kepada publik PPID akan mengadakan uji konsekuensi jadi tidak ada benturan atau pengaruh tekanan dari pihak lain mengenai informasi apa saja yang harus disebarkan dan tidak boleh disebarkan yang sifatnya tidak sesuai dengan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik itu sesuai dengan prinsip kemandirian dari prinsip *Good corporate governance* .

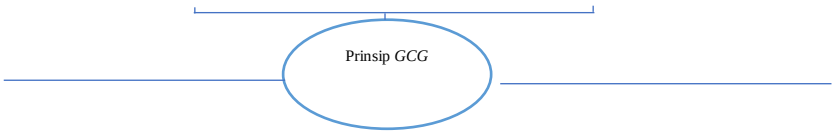
3. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Implementasi keterbukaan informasi publik dapat dilihat dari cara humas menyebarkan informasi dan juga mengendalikan informasi. Implementasi yang dilakukan oleh humas PT. Kereta Api Indonesia itu didasari oleh undang-undang keterbukaan informasi publik yang menjamin serta membuka akses informasi hingga partisipasi masyarakat diharapkan akan lebih membuka proses transparansi dan keterbukaan,yang pada gilirannya akan bermuara pada akuntabilitas semua badan publik. Pihak yang melaksanakan keterbukaan informasi publik adalah PPID. PPID di PT. Kereta Api Indonesia itu berada di bagian *Public Information Care* dan PPID itu berwenang untuk menyebarkan informasi mengenai

perusahaan dan menyediakan informasi untuk masyarakat mengenai perusahaan tetapi tetap berdasar kepada undang-undang keterbukaan informasi publik dimana informasi yang harus disediakan menurut undang-undang keterbukaan informasi publik itu terdapat tiga informasi yaitu informasi berkala, informasi wajib ada serta informasi serta merta. Media yang digunakan oleh humas PT. Kereta Api Indonesia dalam upaya menerapkan keterbukaan informasi publik itu ada website, media sosial dan juga media cetak. Dalam penerapan keterbukaan informasi publik ini humas PT. Kereta Api Indonesia juga melakukan pengendalian terhadap informasi yang diberikan kepada publik. Pengendalian informasi yang dilakukan oleh humas PT. Kereta Api Indonesia juga beradasarkan kepada undang-undang keterbukaan informasi publik pasal 17. Selain humas PT. Kereta Api Indonesia berwenang dalam menyebarkan informasi tetapi tidak semua informasi dapat di sebarkan adapula informasi yang dikecualikan untuk disebarkan kepada publik. Implementasi keterbukaan informasi publik di humas PT. Kereta api Indonesia itu dilakukan untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good corporate governance* dimana penerapan dari KIP ini tujuannya yaitu yang pertama transparansi dimana humas PT. Kereta Api Indonesia dituntut dalam keterbukaan dalam melaksanakan pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi tentang perusahaan, kedua kemandirian dimana suatuperusahaan dikelola tanpd pengaruh atau bernturan dari pihak lyar yang berbenturan dengan udang-undang, ketiga

akuntabilitas yaitu perusahaan dengan jelas menjalankan fungsinya dan bertanggungjawab agar kip terlaksana dengan efektif, keempat pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat, yang kelima yaitu kewajaran dimana dalam memberikan informasi harus bersikap adil dan setara dalam memenuhi kebutuhan informasi berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PT. Kereta Api Indonesia itu dilakukan selain untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good corporate governance* juga kewajiban dari pemerintah bahwa setiap perusahaan BUMN salah satunya adalah wajib menerapkan keterbukaan informasi publik dalam perusahaan. Pada pelaksanaan dalam menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik maka untuk mendorong agar badan publik itu terbuka komisi informasi melakukan *monitoring* dan evaluasi setiap akhir tahun.




Prinsip *GCG*

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Humas PT. Kereta Api Indonesia memiliki wewenang dalam menyebarluaskan dan menyediakan informasi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada publik. Pihak yang dapat menyebarluaskan dan menyediakan informasi di PT. Kereta Api Indonesia itu adalah PPID. PPID di PT. Kereta Api Indonesia adalah Manager *Public Information Care* dibawah VP *Public Relations.* Informasi yang disebarkan atau disediakan oleh humas PT. Kereta Api Indonesia itu meliputi informasi berkala, informasi wajib ada, dan informasi serta merta. Penyebarluasan informasi oleh Humas PT. KAI yaitu sebagai pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan prinsip dari *Good corporate governance* .
2. Pengendalian Informasi di PT. Kereta Api Indonesia itu dikendalikan oleh PPID, dalam meminta informasi pemohon informasi harus mengikuti prosedur-prosedur terlebih dahulu tetapi tidak semua informasi dapat diberikan terdapat beberapa informasi yang dikecualikan atau tidak boleh diberikan kepada publik seperti Rahasia Negara, Informasi belum dikuasai, Rahasia Jabatan, Rahasia Bisnis, dan Rahasia Pribadi. Kendala yang dialami oleh Humas PT. Kereta Api Indonesia yaitu proses dalam meminta data pada unit lain terdapat beberapa unit dalam memberikan data prosesnya terbilang agak lama sehingga proses pemberian informasi kepada publik menjadi terhambat. Pengendalian informasi yang dilakukan oleh Humas PT. Kereta Api Indonesia merupakan pelaksanaan dari prinsip kemandirian, pertanggungjawaban dan kesetaraan dalam prinsip *Good corporate governance* .
3. Implementasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh humas PT. Kereta Api Indonesia salah satunya untuk melaksanakan kelima prinsip *Good corporate governance* . PT. Kereta Api Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di Indonesia setiap BUMN wajib menerapkan keterbukaan informasi publik. Dalam implementasi keterbukaan informasi publik di PT. Kereta Api Indonesia didasari oleh

UU keterbukaan informasi publik yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Keterbukaan informasi publik ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia. Penerapan keterbukaan informasi publik ini selalu diadakan evaluasi dan pemeringkatan satu tahun sekali oleh komisi informasi pusat.

Saran

Dalam penelitian ini peneliti memiliki beberapa saran yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

Bagi PT. Kereta Api Indonesia

a. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik yang diterapkan di PT.KAI agar masyarakat lebih partisipatif dalam pelaksanaan penerapan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh PT.KAI
b. Memberikan sosialisasi kepada karyawan PT. Kereta Api Indonesia supaya proses permintaan informasi ke setiap unit prosesnya tidak lama.
c. Mempertahankan kualitas pelayanan informasi kepada publik sebagai perwujudan tata kelola perusahaan yang baik.

6. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M.Syukur. 1988. *Perkembangan Studi Implementasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi RI.

Ardianto, Elvinaro. 2013. *Handbook of Public Relations*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media

Bernadine, R.Wijana M.S.W dan Prof. Dr. Susilo Supardo. 2006. *Kepemimpinan dasar-dasar dan pengembangannya*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Cangara, Hafied. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Danandjaja. 2011. *Peranan Humas dalam Perus*ahaan. Yogyakarta: Graha Ilmu

Dipopramono, Abdulhamid. 2017. Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik. Jakarta: Renebook

Effendy, Onong Uchjana. 2013. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung:PT. Remaja Rosda Karya.

Effendi, Muh Arief. 2016. *The Power Of Goodocorporateigovernancep*: Teori Dan Implementasi Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

Liliweri, Alo. 2014. *Sosiologi dan komunikasi organisasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Nurudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rakhmat, Jalaludin. 2009. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Rohim, Syaiful. 2009. *Teori Komunikasi: Perspektif Ragam & Aplikasi*, Jakarta : Rineka Cipta

Romli, Khomsahrial. 2011. *Komunikasi Organisasi Le*ngkap. Jakarta : PT. Grasindo.

Ruslan, Rosady. 2014. *Manajemen Public Relations dan media komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*

R. Wayne Pace, Don F. Faulos. 2001. *Komunikasi Organisasi: Strategi meningkatkan kinerja perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kua*litatif. Bandung ALFABETA.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV.Alfabeta.

Surya, Indra & Yustiavanda, Ivan. 2006. *Penerapan GCG Mengesampingkan Hak- Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana.

Widodo, Joko. 2007. *Analisa Kebijakan Publik. Malang*: Bayu Media Publishing.

Internet Seaching

http://kip.kereta-api.co.id/ (Senin, 23 April 2018 Pukul 08.00 WIB)

http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=164888 (Rabu, 25 April 2018 Pukul 14.00 WIB)